BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu praktik perjanjian dalam hubungan internasional yang dilakukan dalam syariat Islam. Di dalam kesepakatan Hudaibiyah terdapat hukum ekstradisi terhadap orang-orang Makkah yang berada di Madinah, pengekstradisian orang-orang tersebut karena kafir Quraisy menganggap mereka merupakan orang yang jahat sebab telah berkhianat dari daerah asalnya. Sedangkan umat Islam yang berada di Madinah tidak meminta ekstradisi terhadap muslim yang pergi ke Makkah ketika perjanjian itu berlangsung, karena perlakuan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap umat Islam dan orang-orang yang berkhianat merupakan orang yang berbahaya.

Di tengah berjalannya Perjanjian Hudaibiyah, datang sekelompok perempuan muslimah yang meminta perlindungan kepada Rasulullah, jika saja Allah tidak menurunkan QS. al-Mumtahanah: 10 tentu Rasulullah juga akan mengembalikan perempuan muslimah tersebut ke Makkah layaknya Abū Baṣīr dahulu, sesuai dengan Perjanjian Hudaibiyah. QS. al-Mumtahanah: 10 turun untuk memberi perlindungan kepada perempuan muslimah tersebut yang dalam hubungan internasional status mereka merupakan pengungsi yang mencari suaka (perlindungan). Larangan dasar dari QS. al-Mumtahanah: 10 ini merupakan aspek ideal moral dalam kajian hermeneutika *double movement* karena merupakan sebab dasar

diturunkannya ayat tersebut. Sedangkan isi dari QS. al-Mumtahanah: 10 tidak hanya berbicara tentang non-ekstradisi, akan tetapi akibat serta hukum terkait hubungan umat Islam dan kafir Quraisy khususnya dalam pernikahan, disebut pula dengan aspek legal spesifik.

Akan tetapi mayoritas tafsiran dan kajian dewasa ini lebih fokus menggunakan ayat 10 QS. al-Mumtahanah ini sebagai ayat yang berbicara terkait hukum pernikahan beda agama saja. Dari relevansi hermeneutika *double movement* di atas dapat kita simpulkan bahwa QS. al-Mumtahanah: 10 berlaku pula dalam konsep non-ekstradisi bagi pengungsi yang mencari suaka.

B. Saran

Kajian terhadap QS. al-Mumtahanah: 10 tidak berhenti sebatas non-ekstradisi terhadap pengungsi dalam hubungan internasional, hubungan antar agama dan pernikahan antar agama saja. Tidak menutup kemungkinan akan ada permasalahan lain yang dapat dikaji dari QS. al-Mumtahanah: 10 melalui penerapan teori lainnya yang tidak terbatas pada penafsiran, ini disebut dengan *Alquran shalihun li kulli zaman wa makan*. Dengan hadirnya skripsi ini, diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi pemikiran terkait tafsir dan hubungan internasional, sehingga menjadi ruang bagi peneliti setelah ini untuk mengkaji lebih dalam QS. al-Mumtahanah: 10.